

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rangkaian proses demokratisasi yang terjadi di Myanmar menunjukkan adanya upaya untuk mensukseskan transisi politik negara yang awalnya menerapkan gaya kepemimpinan autoritarianisme menuju sistem politik demokratis. Proses tersebut tidak hanya melibatkan satu negara melainkan turut menjadi bagian dari agenda negara lain maupun subjek internasional lainnya termasuk Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam keberlangsungan proses demokrasi di Myanmar tidak terlepas dari sejarah hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin dari masa pra dekolonisasi hingga saat ini. Pemerintah Indonesia melalui strategi *Constructive Engagement* berusaha untuk menerapkan sebuah bentuk pendekatan diplomasi yang bersifat konstruktif dengan berlandaskan semangat inklusif guna mewujudkan demokrasi dan perbaikan atas perlindungan HAM di Myanmar. Perumusan strategi *Constructive Engagement* mencerminkan arah politik luar negeri Indonesia yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Indonesia dalam hubungannya dengan Myanmar. Keputusan untuk menetapkan strategi *Constructive Engagement* sebagai metode diplomasi Indonesia dalam mendukung demokratisasi di Myanmar juga tidak terlepas dari pertimbangan Pemerintah Indonesia terhadap situasi politik dalam negeri Myanmar. Selama lebih dari enam dekade Myanmar telah melalui berbagai situasi dan instabilitas politik yang ditimbulkan dari proses transisi. Myanmar yang memiliki kesamaan historis dan kultural dengan Indonesia menghadapi hambatan yang dating dari konflik internal antara kelompok etnis minoritas dengan otoritas pemerintahan dalam hal ini rezim militer. Pada akhirnya situasi dalam negeri Myanmar kemudian mengundang berbagai reaksi yang berbeda dari komunitas internasional. Dari berbagai reaksi tersebut tak jarang ditemukan negara-negara yang mengecam tindakan anarkis rezim militer Myanmar dan memutuskan untuk

menerapkan sanksi ekonomi sebagai bentuk kecaman terhadap Myanmar. Indonesia menilai bahwa tindakan pemberian sanksi ekonomi tidak dapat membantu menyelesaikan persoalan internal di Myanmar bahkan dapat menghambat langkah demokratisasi di Myanmar. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia mengambil bentuk *pendekatan Constructive Engagement* yang menitikberatkan pada penggunaan pendekatan politik, ekonomi dan sosial guna mewujudkan perubahan politik dan mengubah Myanmar menjadi negara yang demokratis dan menjunjung prinsip-prinsip HAM. Pembahasan mengenai keputusan Indonesia menerapkan strategi *Constructive Engagement* dalam kebijakan luar negeri untuk mendukung demokratisasi di Myanmar dapat menambah kontribusi dalam pengembangan ilmu Hubungan Internasional. Dimana melalui pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini, dapat diketahui bahwa dalam melakukan hubungan internasional penggunaan sarana diplomasi yang menekankan pada pendekatan yang bersifat persuasif sebagai alat penggerak politik luar negeri suatu negara masih dapat ditemukan. Selain itu dapat pula diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan politik luar negeri yang dilakukan melalui penerapan metode pendekatan *Constructive Engagement* yang meliputi berbagai bentuk kerja sama dan keterlibatan aktif dalam menyelesaikan isu domestik dalam negeri Myanmar. Skripsi ini berfokus pada pembahasan tentang strategi diplomasi dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia pada tahun 2011 di bawah administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Melihat keberlanjutan penggunaan strategi *Constructive Engagement* dalam kebijakan politik luar negeri dari kedua administrasi pemerintah Republik Indonesia ini tentunya menunjukkan terdapat pencapaian positif yang diraih oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan penerapan pendekatan *Constructive Engagement* dalam mewujudkan tujuan politik luar negeri Indonesia.